REKONSTRUKSI PERAMPASAN ASET DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:
Muhammad Imanuddin [G)]
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. [*)]
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. [**)]

ABSTRAK

Korupsi mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan korban, negara harus memiliki penegakan hukum dan strategi pemberantasan yang ampuh dan dapat mengembalikan kerugian semaksimal mungkin kepada korbannya. Negara sebagai pihak yang paling dirugikan oleh tindak pidana korupsi harus mengupayakan pengembalian aset yang telah dikorupsi

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, khususnya mengenai rekonstruksi hukum terhadap pengguna narkotika yang berbasis nilai keadilan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Rekonstruksi perampasan aset dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan, yaitu dengan memformulasikan Undang-Undang Perampasan Aset, dan terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada bagian penjelasan mengenai kewenangan Jaksa untuk mengajukan menempatkan terpidana dalam pengampuan melalui kepailitan berdasarkan kepentingan umum, yaitu perluasan ruang lingkup kepentingan umum pada huruf f, yakni : ***Dalam rangka pengembalian negara hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.*** Dengan demikian dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi, dapat dikenakan terhadap harta yang akan ada di kemudian hari sebagaimana diterapkan dalam hal kepailitan.

Kata Kunci : Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, dan Keadilan

[*)] Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
[**)] Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

RECONSTRUCTION OF INSTRUMENT ASSEMBLY RETURN OF STATE FINANCIAL LOSS DUE TO CRIMINAL ACTION CORRUPTION BASED ON JUSTICE VALUE

Muhammad Imanuddin[G)]
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.[*)]
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.[**)]

ABSTRACT

Corruption causes huge losses and victims, the state must have effective law enforcement and eradication strategies and can restore losses to the maximum extent possible to the victims. The state as the party most disadvantaged by corruption must seek the return of assets that have been corrupted.

The main problem in this study includes one of the criminal law policies, especially regarding the legal reconstruction of narcotics users based on the value of justice. Therefore the approach used is a policy-oriented approach (policy oriented approach).

Reconstruction of asset seizure in the return of state financial losses as accountability of perpetrators of corruption which is based on the value of justice, namely by formulating the Law on Asset Deprivation, and against Article 2 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations in the explanation section the authority of the Prosecutor to propose placing the convicted person through bankruptcy based on public interest, namely the expansion of the scope of the public interest in letter f, namely: In the context of returning the state resulting from a criminal act based on a court decision. Thus, in returning the loss of state finances as the responsibility of the perpetrators of corruption, it can be imposed on assets that will exist later on as applied in the case of bankruptcy.

Keywords: Deprivation of Assets, Corruption and Justice

[*)] Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University
[**)] Promoters and co promoter Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University